

DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

Muhammad Zaim

STIT Darul Ulum Kotabaru, Kalimantan Selatan
e-mail: miazart.mz@gmail.com

ABSTRACT

The growth of Islamic higher education institutions (PTAI) cannot be separated from the existence of private Islamic universities (PTAIS). It can be seen that the early establishment of the Islamic religious college (PTAI) actually came from a private Islamic religious college (PTAIS). In fact, the existence of a private Islamic religious university (PTAIS) existed before Indonesia's independence. In the 1930s, the desire and aspirations of Indonesian Muslims emerged to establish Islamic tertiary institutions.

Admittedly or not, currently the quality of private Islamic higher education institutions (PTAIS) is still inferior to state Islamic colleges (PTAIN). This kind of image certainly does not benefit the position of the private Islamic university (PTAIS) which is in the second place. Of the number of private Islamic universities (PTAIS), there are only a few universities that are considered feasible, the rest are still below standard. The question is, what is the role of Islamic education policy in private Islamic universities (PTAIS) in improving its quality so that it can compete with state Islamic universities (PTAIN).

Keywords: Islamic Education Policy, Islamic Education, Private

ABSTRAK

Pertumbuhan perguruan tinggi agama Islam (PTAI) tidak lepas dari keberadaan perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS). Hal ini bisa dilihat awal berdirinya perguruan tinggi agama Islam (PTAI) ternyata berasal dari perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS). Sebenarnya keberadaan perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1930-an, telah muncul hasrat dan cita umat Islam Indonesia untuk mendirikan perguruan tinggi Islam.

Diakui atau tidak, sekarang ini kualitas perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) masih kalah dengan perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN). *Image* yang semacam ini tentu tidak menguntungkan posisi perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) yang dikategorikan sebagai peringkat kedua. Dari jumlah perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) hanya terdapat beberapa perguruan tinggi yang dikatakan layak, selebihnya masih di bawah standar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana peran kebijakan pendidikan Islam di perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) dalam meningkatkan kualitasnya sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi agama Islam negeri (PTAIN).

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi Islam, Swasta

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia ditempatkan posisi strategis. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yakni, *“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak langsung menyebutkan kata pendidikan Islam, tetapi secara substansi harapan besar tertumpu pada pendidikan Islam. Yakni dapat di lihat dalam kalimat, *“.....menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlakul karimah.”* Sebagai penjabaran tujuan pendidikan nasional, kurikulum setiap pendidikan dasar, menengah dan tinggi harus memuat pendidikan agama (UU No.20 tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 dan 2).

Konsekuensi dari adanya UU tersebut, maka setiap jenjang harus melaksanakan pendidikan agama dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pengertian pendidikan agama dijabarkan dalam PP. No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 ayat 1 disebutkan, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Diantara pendidikan agama yang ada di Indonesia adalah pendidikan Islam. Dari segi penyelenggaraan pendidikan Islam di perguruan tinggi, menurut penulis dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni: pertama, perguruan tinggi Islam yang diselenggarakan pemerintah. Jenis ini juga disebut dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), contohnya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maliki Malang, dan lain-lain. Kedua, perguruan tinggi Islam yang diselenggarakan masyarakat atau disebut dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), contohnya Universitas Wahid Hasyim Semarang, UNSURI Surabaya, *Ma’had ‘Ali* yang berada di pondok pesantren dan lain-lain. Ketiga, Pendidikan Islam yang dilaksanakan Perguruan Tinggi Umum baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat misalnya UGM, UNIBRAW, UM dan lain-lain.

Lebih khusus lagi Qomar membagi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dari segi tanggung jawabnya pengelolaan, dibagi menjadi dua, yakni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). PTAIN hampir sepenuhnya didanai

pemerintah, sedangkan PTAIS hampir sepenuhnya didanai oleh masyarakat (Qomar, 2007).

Seiring dengan derasnya arus kompetisi global di dunia pendidikan tinggi pada milenium ketiga ini membuat banyak perguruan tinggi terutama PTAI di Indonesia acapkali kesulitan untuk mengikuti perkembangannya, terutama Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang notabene secara kualitas dan instrumentasi pendidikannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Dampaknya, banyak di antara mereka yang mengalami nasib yang mengenaskan, atau „gulung tikar.

Realitas itu selanjutnya membawa dampak yang luar biasa terhadap munculnya image kesenjangan kualitas antara PTN dan PTS yang pada akhirnya memunculkan pandangan dikotomis bahwa PTN merupakan perguruan tinggi yang memiliki mutu yang lebih baik daripada PTS. Kondisi ini membuat masyarakat lebih percaya dan cenderung memilih PTN umum dibanding dengan perguruan tinggi Islam (contoh UIN), apalagi bila dibandingkan dengan perguruan tinggi internasional, baik di dalam maupun diluar negeri seiring dengan arus liberalisasi pendidikan dunia.

Internasionalisasi pendidikan tinggi ke depan bukanlah suatu ironi. Tetapi realitas kekinian yang sudah semakin mengarahkan *probability* itu menjadi suatu kenyataan. Namun, Indonesia yang didukung oleh PTAI yang begitu besar haruslah memiliki kebijakan yang mampu menyiapkan perangkat kompetitif pendidikan tinggi Islam sedini mungkin sehingga ke depan PTAI di Indonesia memiliki *good governonce system* pendidikan tinggi yang unggul sehingga mampu berkompetisi di level internasional tanpa kehilangan *Islamic morality character* sebagai dasar aplikasinya (Wajdi, 2016).

Dalam konteks PTAIS, laporan di atas dijadikan motivasi untuk segera membenahi kondisi pendidikan tinggi Islam, terutama yang berstatuts swasta. Bagaimanapun juga, di abad 21 ini, eksis tidaknya suatu perguruan tinggi, bergantung pada kesiapan lulusan dan lembaganya untuk bersaing di tengah masyarakat yang penuh dengan kompetisi (*mega-kompetisi*) dan memiliki kesadaran global (*global consciousness*). Oleh karena itu, pembenahan pendidikan tinggi Islam terutama PTAIS menjadi suatu tuntutan yang mutlak untuk dilakukan agar terjadi perubahan kualitas serta terus eksis sebagai lembaga pendidikan yang disegani baik di masa kini dan terutama di masa yang akan datang. Kennedy mengatakan, "*Change is a way of life. Those who look to the past or present will miss the future.*" Perubahan adalah hal yang niscaya maka dalam melakukan reformasi pendidikan harus berpegang pada tantangan masa depan yang penuh dengan persaingan global agar mampu berkompetisi secara baik, bukan bernostalgia atas masa silam (Suyanto, 2000). Saat ini, Perguruan Tinggi Agama Islam, sebagai wadah untuk mendidik dan membina kader-kader pemimpin Agama dan Bangsa memerlukan suatu cara pengelolaan yang baru dan berbeda dengan pengelolaan instansi non pendidikan pada umumnya. Lembaga

pendidikan adalah lembaga akademik bukan lembaga kantoran. Oleh karena itu, tata kelola/manajemen yang digunakan oleh perguruan tinggi berbeda dengan manajemen yang digunakan di perkantoran biasa. Manajemen yang digunakan di perguruan tinggi diatur selain harus rapi, efisien dan transparan juga harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan akademik, seperti adanya prioritas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Sufyarma, 2004).

Secara normatif, peraturan-peraturan akademik dan administrasi mempunyai tata kerja yang dapat membentuk suatu sistem tertentu yang harus ditaati dengan penuh disiplin dan dedikasi dari semua pihak. Dengan sistem seperti ini maka ada jaminan penuh bahwa perguruan tinggi akan berkembang ke arah yang sudah ditentukan walaupun sering berganti pimpinan. Prasarana dan sarana akademik harus diprioritaskan daripada sarana dan prasarana non akademik, seperti perpustakaan, laboratorium, internet, note book dan buku-buku yang sangat dibutuhkan oleh para tenaga pengajar agar senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya (Fadjar, 2005).

Dalam tulisan ini yang akan dibahas penulis adalah pelaksanaan Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Kemudian untuk memfokuskan pembahasan tulisan ini akan dibatasi pada sejarah berdiri PTAIS, pelaksanaan, problematika, dan solusinya.

SEJARAH BERDIRINYA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)

Pertumbuhan perguruan tinggi agama Islam (PTAI) tidak lepas dari keberadaan PTAIS. Hal ini bisa dilihat awal berdirinya PTAI ternyata berasal dari PTAIS. Sebenarnya keberadaan PTAIS sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1930-an, telah muncul hasrat dan cita umat Islam Indonesia untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Menurut Daulay (2004) menyebutkan pada saat itu Dr. Satiman bercita-cita untuk mendirikan Sekolah Tinggi Islam di tiga tempat, yakni Jogjakarta, Solo, dan Jakarta. Kemudian sepuluh tahun berikutnya, tepatnya tanggal 9 Desember 1940 di Padang berdiri Sekolah Islam Tinggi (SIT) yang didirikan oleh persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI), meskipun pada akhirnya ditutup karena pendudukan Jepang pada tahun 1942 (Hanun, 1999).

Semangat berdirinya Sekolah Tinggi Islam juga tumbuh di Jawa, yakni pada bulan April 1945, Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) menggelar pertemuan dengan mengundang para ulama dan intelektual untuk merencanakan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (Djamaluddin, 2006). Ulama dan intelektual yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Anwar Cokroaminoto, Dr. Satiman, KH. Ahmad Sanusi, dan KH. Kahar Mudzakhir.

Diantara hasil pertemuan adalah dibentuknya panitia perencana Sekolah Tinggi Islam (STI) yang diketuai Muhammad Hatta. Hasil kerja

panitia tersebut adalah didirikannya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945. Tujuan didirikannya STI adalah untuk mencetak ulama intelek yaitu sosok muslim intelektual yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang luas dan mendalam dan sekaligus menguasai ilmu pengetahuan umum yang diperlukan masyarakat modern.

Dalam perkembangan berikutnya, kondisi Jakarta tidak memungkinkan diselenggarakannya pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan Belanda menduduki kembali Kota Jakarta, terpaksa STI di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII) dan dibuka tanggal 10 Maret 1948 (Djamaluddin, 2006). Pada saat itu UII memiliki empat fakultas, yakni Fakultas agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi.

Dari UII telah mengukir dalam sejarah dalam mengawali pengembangan lembaga pendidikan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia dengan menyerahkan Fakultas Agama UII kepada Negara, akhirnya menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1950 (Hasjmy, 1979). Hal serupa juga terjadi pada UII Cabang Surakarta (sebelumnya bernama Perguruan Tinggi Islam Indonesia) tiga fakultas umum bersama dengan beberapa fakultas dari swasta yang lain dan IKIP Negeri yang sudah ada menjadi Universitas Negeri Surakarta (UNS) Surakarta.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan PTAIS memberikan kontribusi terhadap perkembangan PTAIN di Indonesia. Sehingga keberadaan PTAIS tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan masyarakat.

PELALAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang menyangkut tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) secara fungsional adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Agama Islam. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) mempunyai tanggung dan fungsi melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTAIS yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut data Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Perguruan Tinggi Agama Islam terdiri dari empat klasifikasi, yakni:

1. Universitas Islam Negeri (UIN);
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
4. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS).

Program-program studi tersebut terdiri dari dua kelompok besar yaitu Program Studi Ilmu-ilmu Keislaman (Ushuluddin, Syari'ah,

Tarbiyah, Dakwah, Adab) dan Program Studi Ilmu-ilmu Umum (Kedokteran, Psikologi, Ekonomi, Sains dan Teknologi, Sosial Humaniora, dan Ilmu Pengetahuan Alam).

Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) termasuk PTAIS, didirikan dalam rangka untuk menjawab tantangan ke depan, yaitu mencetak sarjana yang memiliki kualifikasi dalam bidang agama Islam. Sesuai dengan pembidangan di atas, alumni PTAI adalah sarjana yang tergolong ke dalam tataran keilmuan yang teoritis dan implementatif. Sebagai ciri keilmuan yang teoritis dan implementatif adalah keahlian yang tidak semata-mata implementatif, tetapi juga memiliki keahlian konseptual, yang berciri khas analitik.

Keahlian analitik diperlukan sebab mereka berhadapan dengan perubahan sosial secara terus menerus yang tentunya juga mengharuskan perubahan paradigma dalam berpikir. Ilmu-ilmu agama memiliki kaitan dengan dunia sosial-antropologis, bahkan politik dan ekonomi, sehingga pengembangan keilmuan Islam juga harus tertata dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka produk PTAIS akan memiliki profil sebagai sarjana yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap perubahan-perubahan sosial-relegius berdasarkan pendekatan keilmuan yang relevan.

Peranan pendidikan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia dapat dicirikan pada tiga hal. Pertama, mencetak manusia yang bertanggung jawab. Menurut Azizi (2001) bahwa ada kaitan antara fitrah, akhirat dan tanggung jawab. Setiap perbuatan pasti ada tanggung jawabnya yang berkonsekuensi di akhirat. Tanggung jawab tidak hanya sekedar administratif di dunia, tetapi lebih jauh secara substantif di akhirat. Melalui tanggung jawab inilah akan tercipta etika sosial, karena setiap tindakan dalam bentuk apapun akan memiliki nilai tanggung jawab baik dunia maupun akhirat.

Kedua, peran kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir mengajarkan pada kita bahwa ilmu pengetahuan adalah sarana untuk membebaskan, dalam arti bahwa melalui kemampuan berpikir manusia diajarkan untuk menemukan (*discovery*) tentang sesuatu dalam bidangnya. Kebebasan dalam konteks ini adalah kebebasan untuk menemukan sesuatu, merevisi, atau menguatkan suatu dalil, teori dan konsep yang telah ada untuk kemaslahatan.

Ketiga, penguasaan terhadap kompetensi. Pendidikan harus mengarahkan peserta didik pada keahlian tertentu sehingga menjadi sarana untuk mengakses kehidupan. Oleh karena itu maka pendidikan tinggi harus dirancang untuk mewujudkan sarjana yang profesional sesuai dengan keahliannya.

Sedangkan dalam kebijaksanaan strategis perguruan tinggi Islam termasuk PTAIS, menurut Feisal (1995) adalah:

- a. Membina dan memperbaiki keimanan mahasiswa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber kepada Al-Quran, As-

- Sunah, dan ijtihad atau pemikiran skolastik yang menggambarkan cara berfikir normatif dan berfikir deskriptif empiris;
- b. Mengembangkan rasa, sikap, dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang universal;
 - c. Mengembangkan kemampuan intelektual sehingga mampu berpikir ilmiah rasional dan logis;
 - d. Mengembangkan keterampilan-keterampilan tertentu untuk dapat secara nyata menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehari-hari.

Sementara itu, pelaksanaan pendidikan Islam di PTAIS tidak lepas peran serta masyarakat. Sebagian masyarakat di Indonesia masih memandang agama sebagai hal yang urgen dalam kehidupan. Oleh karena itu mengetahui dan memahami persoalan agama merupakan hal yang wajib. Maka wajar jika di Indonesia terdapat beberapa pesantren dan lembaga pendidikan Islam dengan jumlah santri yang relatif banyak. Kondisi seperti itu dapat menunjang kuantitas mahasiswa PTAIS. Sehingga PTAIS tidak sampai kekurangan mahasiswa.

Pada sisi lain, masyarakat Indonesia relatif paternalistik sehingga keterikatan pada tokoh masyarakat atau kyai masih besar. Dalam konteks ini, kyai merupakan status yang dihormati dengan berbagai peran yang dimainkan dalam masyarakat. Ketokohan dan kepemimpinan kyai sebagai akibat dari status yang disandangnya, telah menunjukkan betapa kuatnya kecakapan dan pancaran kepribadiannya (kharisma) dalam memimpin pesantren dan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat bagaimana seorang kyai dapat membangun peran strategisnya sebagai pemimpin masyarakat nonformal melalui komunikasi intensif dengan masyarakat. Kyai dengan karisma yang dimilikinya tidak hanya dikategorikan sebagai elit agama, tapi juga sebagai pemimpin (tokoh sentral) dalam masyarakat yang memiliki otoritas tinggi. Karisma kyai merupakan karunia yang diperoleh dari latihan (*riyadlah*) dan anugerah Tuhan (Turner, 1984). Sehingga apa yang menjadi kehendak dan pendapat kyai, akan diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, kyai merupakan sumber legitimasi yang potensial bagi PTAIS. Sehingga pencitraan PTAIS bisa dibangun dari sini.

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)

Diakui atau tidak, sekarang ini kualitas PTAIS masih kalah dengan PTAIN. *Image* yang semacam ini tentu tidak menguntungkan posisi PTAIS yang dikategorikan sebagai peringkat kedua. Dari jumlah PTAIS hanya terdapat beberapa perguruan tinggi yang dikatakan layak, selebihnya masih di bawah standar.

Secara umum, terdapat kesenjangan pencitraan yang terlalu jauh antara PTAIN dengan PTAIS. PTAIN identik dengan perguruan tinggi yang besar dan bermutu lebih baik daripada PTAIS. Kondisi ini membuat masyarakat lebih memercayai PTAIN daripada PTAIS. Ini merupakan

stereotipe dari keberpihakan masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri umum, misalnya ITB, UI, UGM dan IPB daripada perguruan tinggi swasta seperti Universitas Trisakti, Atma Jaya, Universitas Parahyangan dan Universitas Muhammadiyah Malang, meskipun pada beberapa segi mereka memiliki kualitas yang setara dengan universitas negeri bahkan boleh jadi melebihinya. Uang SPP (sumbangan pendidikan) pun kadangkala tidak jauh berbeda. Dampak dari pencitraan tersebut, *row out put* pada perguruan tinggi swasta menjadi kurang bagus. Hal tersebut membuat perguruan tinggi swasta bekerja lebih keras lagi untuk menjaring calon mahasiswa yang berkualitas agar masuk universitas swasta. Dalam konteks pendidikan Islam pun sama. PTAIS (masyarakat muslim Indonesia) hendaknya lebih bersemangat lagi dalam menjaring calon mahasiswa yang berkualitas. Bagaimanapun juga mengembalikan *the golden age of Islam* di Indonesia bukan hanya tanggung jawab PTAIN tetapi merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat (PTAIS) (Mas'ud, 2001).

Secara umum, PTAI masih kalah bersaing dalam menghasilkan *out put* yang siap dipakai. Tiap tahunnya, hampir 43% lulusan PTAI tidak terserap ke dalam dunia kerja, baik di sektor publik maupun non publik (Ahmad Rivan, 2005). Kondisi ini digambarkan oleh Mark Haynes Daniel (2002) sebagai *scary but true*, menakutkan tetapi benar. Setelah beberapa IAIN berubah menjadi UIN, harapan untuk menghindari ramalan Daniel agak terbuka. Kini, UIN tidak lagi memandang secara terpisah/dualisme tentang ilmu. Bagi UIN tidak ada lagi pemisahan/keberpihakan secara teologis antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengetahuan agama. Kedua ilmu tersebut pada dasarnya sama. Oleh karena itu, harus diperlakukan sama yaitu wajib dipelajari. Masyarakat abad 21 cenderung mengarah pada pembentukan masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan (*knowledge society*) tanpa harus kehilangan nilai-nilai agama (Bunyamin, 2013).

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan Islam di PTAIS adalah:

a. PTAIS belum menjadi pilihan utama calon mahasiswa

Selama ini kebanyakan calon mahasiswa (*input*) yang masuk PTAIS adalah mereka yang gagal dalam ajang masuk di PTN dan PTAIN. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka yang masuk PTAIS adalah mahasiswa yang kurang berkualitas baik dari segi intelegensinya maupun ekonominya. Akibatnya tentu saja lulusan (*out put*) pendidikan menjadi kurang maksimal.

b. banyak dosen yang belum memenuhi tugas keprofesionalan

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 60, disebutkan dosen harus memenuhi tugas profesional, yakni melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu dalam kualifikasi pendidikan, dosen harus berpendidikan sekurang-kurangnya adalah S2. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 46 ayat 2 bahwa, dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Kondisi di lapangan, masih ada temuan dosen yang mengajar di PTAIS, kualifikasi pendidikannya di bawah standar.

c. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran disamping faktor-faktor yang lain. Sarana dan prasarana yang memadai akan menjadikan suasana akademik dan proses pembelajaran menjadi kondusif dan sistematis. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai proses belajar dan mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana, terutama sarana belajar dan mengajar, merupakan hal yang esensial.

Kondisi riil, sarana dan prasarana yang dimiliki PTAIS tergolong masih minim. Padahal, keberadaan sebuah pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana pendidikannya, seperti ruang perkuliahan, perpustakaan dengan ruangan dan koleksi buku yang memadai, laboratorium pembelajaran yang memadai.

d. Proses belajar dan mengajar yang belum berkualitas.

Ada indikasi banyak PTAIS yang kurang serius dalam melakukan proses pembelajaran. Kekurangseriusan dalam proses pembelajaran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: kekurangsiapan tenaga pengajar (dosen tidak profesional) sehingga menyebabkan mahasiswa kurang aktif mengikuti perkuliahan. Mahasiswa hanya pasif mendengarkan dosen memberikan ceramah. Atau juga penyelenggaraan kelas jauh, yang tanpa memperhatikan kualitas pembelajaran.

e. Penguasaan bahasa arab

Mahasiswa PTAIS pada umumnya sangatlah lemah, padahal bahasa Arab merupakan alat pokok untuk memahami al-Quran dan al-Hadits serta kitab-kitab keagamaan klasik (Isna, 2001). Sebenarnya, tidak hanya penguasaan bahasa arab, menurut penulis juga bahasa Inggris.

SOLUSI MASALAH PELAKSANAAN PENDIDIKAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi PTAIS di atas, harus segera dicarikan solusi, diantaranya:

a. Menarik minat mahasiswa untuk masuk PTAIS.

Langkah yang dapat dilakukan oleh PTAIS adalah menjaga kualitas lulusannya dengan baik. Maksudnya, lulusannya dapat diterima di masyarakat dan selalu dicari pengguna lulusan, yakni masyarakat. Untuk bisa mencapai hal tersebut, tentunya kualitas lulusan harus dijaga. Jangan hanya menghasilkan sarjana yang tidak mempunyai kompetensi. Akibatnya, hanya menambah pengangguran yang terdidik. Sebaliknya, apabila kualitas lulusan dijaga dengan baik, bukan hal yang mustahil PTAIS tersebut akan selalu dibanjiri peminat.

b. Meningkatkan profesionalisme dosen

Langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dosen adalah dengan menciptakan iklim akademik yang kondusif bagi dosen untuk mengembangkan tugas keprofesional dosen. Misalnya pihak yayasan untuk mendorong dosen terbiasa meneliti dengan cara memfasilitasi pendirian penerbitan jurnal penelitian. Selain itu, pemberian stimulus bagi dosen yang dapat menulis di jurnal yang diakui nasional maupun internasional diberikan insentif yang layak.

Kemudian untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen, pihak yayasan perlu mendorong dosen agar melanjutkan pendidikan setidaknya mempunyai kualifikasi pendidikan, yaitu minimal harus magister (S-2), atau doktor S3 bahkan mendapatkan gelar puncak akademik, yakni guru besar (professor). Pendanaan studi lanjut bagi dosen bisa saja berasal dari anggaran PTAIS sendiri, atau memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi beasiswa S2/S3 yang diselenggarakan berbagai instansi pemerintah baik Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional atau swasta.

Selain itu, sebagaimana empat kompetensi dasar yang distandarkan oleh pemerintah dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Th. 2005 maupun 5 kompetensi dasar bagi guru agama Islam yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, kompetensi kepribadian menjadi standar yang sangat melekat pada seorang dosen sebagai ciri seorang dosen dari zaman dahulu hingga sekarang. Kompetensi kepribadian ini menjadi suatu hal yang sangat sensitif dalam kedudukan seseorang sebagai seorang dosen, mengingat dalam bangsa dan budaya kita, baik budaya Islam maupun budaya bangsa Indonesia sendiri guru adalah teladan "*digugu dan di tiru*" (Zaim, 2020).

c. Melengkapi sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana prasarana perlu ditingkatkan terus menerus. Karena, dengan sarana prasarana yang lengkap akan mendorong kualitas PTAIS tersebut. Misalnya, dalam perkuliahan bahasa Arab atau Inggris perlu ada laboratorium bahasa. Atau juga laboratorium *micro teaching* yang bertujuan sebagai tempat latihan guru mengajar sebelum nantinya terjun ke kelas sesungguhnya.

Untuk melengkapi sarana prasarana perlu adanya dana yang cukup. Pendanaan ini bisa berasal dari mahasiswa, atau yayasan, atau pemerintah, atau pihak swasta, atau juga dapat digalang dari sumber dana melalui pemetaan ekonomi para konglomerat (aghiya) dan dilanjutkan dengan penyadaran akan pentingnya pendidikan tinggi Islam.

Pendidikan tinggi merupakan investasi manusia. Memang, harus diakui bahwa masih banyak orang mempertanyakan tentang efektivitas investasi melalui pendidikan, terutama efektivitasnya dalam memberikan nilai timbal balik bagi ekonomi individu dan masyarakat. Pendidikan dalam kenyataannya masih belum mampu menjadi sarana investasi yang menggiurkan bagi banyak orang, terutama PTAIS yang berbasis pendidikan humaniora. PTAIS lebih menawarkan tentang "bagaimana menjadi orang baik" dan kurang menawarkan "bagaimana menjadi orang berguna".

d. Meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas

Dosen sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan dosen sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dosen harus pandai membawa peserta didik kepada tujuan yang hendak dicapai.

Oleh karenanya, dosen harus menguasai materi pengajaran, menguasai beberapa metode pengajaran sehingga ia mampu menggunakan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam pembaruan pendidikan, keterlibatan dosen mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peranan yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan (Muhaimin, 2005). Bagi dosen yang belum bisa mewujudkan kelas yang menarik, bisa saja dosen tersebut dikirim untuk mengikuti *shourt course* (pendidikan singkat) di dalam maupun luar negeri.

e. Meningkatkan penguasaan bahasa Arab dan Inggris.

Pada abad 21 memunculkan tantangan internasional dan perspektif global. Model mahasiswa internasional dan pertukaran program fakultas di perguruan tinggi menjadi tren (Syafaruddin, 2005). Karenanya, untuk memenangi tantangan internasional tersebut, penguasaan bahasa asing (Arab maupun Inggris) adalah syarat mutlak. Bahkan, kalau bisa tidak hanya kedua bahasa asing tersebut, tetapi ditambah dengan bahasa asing

lainnya misalnya, mandarin. Karena sekarang ini bahasa mandarin banyak dipelajari seiring kemajuan yang dialami negeri Cina.

B. Strategi Mengembangkan Mutu PTAIS di Indonesia

Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta tidak terlepas dari pengaruh persaingan ketat (*Hiperkompetitif*) baik dari aspek lembaga maupun sumber daya manusia (dosen dan staf) sebuah lembaga pendidikan dapat berkembang dan disegani sekaligus dicintai oleh civitas akademika dan masyarakat dapat selalu menyesuaikan diri dan mampu berkompetisi dan bila mungkin menjadi pemimpin pasar (*Leader*) pada bidangnya. Penelitian ini perlu segera dilakukan disebabkan manajemen mutu Perguruan Tinggi merupakan isu strategis untuk memperbaiki kinerja lembaga Perguruan Tinggi. Adanya penelitian ini akan berkontribusi pada penemuan prinsip-prinsip dalam manajemen mutu Perguruan Tinggi. Kenyataan yang ada pada dewasa ini menunjukkan mutu lulusan perguruan tinggi itu tidak selalu dapat diterima dan mampu untuk bekerja sebagaimana yang diharapkan dunia kerja. Maraknya perguruan tinggi berpotensi merosotnya mutu lulusan, mengingat standarisasi mutu lulusan tidak menjadi tujuan; tetapi hanya dilihat dari aspek kuantitas; yakni bagaimana mendapatkan jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan diberlakukannya otonomi kampus; dimana perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) memiliki kesamaan di dalam pengelolaan, sehingga ada kecenderungan untuk mencari dana yang memadai; namun terkadang mengabaikan aspek mutu itu sendiri.

Titik berat rencana strategi pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam adalah aspek-aspek strategis dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu PTKI. Aspek-aspek strategis yang dimaksud meliputi (1) kinerja penyelenggaraan pendidikan, (2) kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (3) kinerja manajemen PTKIS yang meliputi bidang manajemen sumberdaya insani, keuangan, sumberdaya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi, (4) budaya organisasi dan iklim akademik, dan (5) jaringan kerjasama (*networking*). Yang perlu mendapatkan penekanan adalah bahwa aspek-aspek tersebut bukanlah sesuatu yang saling terpisah tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Berdasarkan realita tersebut, maka diperlukan suatu rumusan kebijakan dalam pengembangan PTKI yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas PTKI. Dilakukan juga menetapkan tujuan dan sekaligus melakukan pengukuran kinerja PTKI, sehingga secara langsung sistem ini taktis dan operasional dalam upaya meningkatkan mutu PTKI yang berdaya saing (Ramdhan, 2019).

Mutu merupakan bagian dari bentuk penjabaran strategi pengembangan PTAIS yang utamanya melakukan perbaikan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam di PTAIS. Sallis (2001) menegaskan bahwa manajemen mutu pendidikan akan sangat membantu institusi

pendidikan, setidaknya untuk tiga hal penting; pertama, manajemen mutu akan memperkuat sistem pengelolaan perguruan tinggi menjadi lebih baik. Maka dengan diterapkannya manajemen mutu, kualitas PTAIS akan menjadi lebih baik. Kedua, dengan manajemen mutu, PTAIS akan mampu menghasilkan produk pendidikan tinggi Islam Swasta yang lebih unggul dan kompetitif. Ketiga, dengan manajemen mutu, PTAIS di Indonesia akan lebih established dalam menjalani kompetisi dengan pendidikan tinggi lain baik swasta maupun negeri, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Mutu dalam konteks PTAIS juga mendorong otonomi perguruan tinggi swasta. Otonomi penyelenggaraan perguruan tinggi swasta awalnya berhubungan dengan kebijakan pemerintah/negara tentang jaminan atas kemandirian perguruan tinggi. Hubungan ini harus berlandaskan pada prinsip kebebasan akademik dan kemandirian kelembagaan. Kemandirian tersebut diperlukan dalam rangka mendorong kreativitas dan kebebasan mengelola dirinya sendiri. Posisi pemerintah pusat hanya menjadikan dirinya sebagai fasilitator melalui sejumlah kebijakan yang bersifat makro agar perguruan tinggi swasta lebih mandiri termasuk PTAIS.

Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi mempunyai konsekuensi/resiko yang besar terutama pada pembiayaan. Agar otonomi perguruan tinggi mempunyai makna bagi kemajuan bangsa dan masyarakat, maka kebijakan tersebut harus berhubungan erat dengan penjaminan mutu atas proses belajar mengajar dan produknya, juga harus meningkatkan akuntabilitas lembaga perguruan tinggi swasta tersebut kepada *stakeholders*. Untuk itu, evaluasi hendaknya terus-menerus dilakukan baik secara internal maupun oleh lembaga akreditasi yang independen.

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, diperlukan kerja sama melalui lebih banyak pembentukan asosiasi perguruan tinggi swasta dan jejaring lainnya. Jejaring antar perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi sebuah asosiasi akan sangat membantu dalam mengatasi kekurangan lembaga pendidikan tinggi baik dalam hal pengadaan *software*, *hardware* maupun *brainware*.

Otonomi perguruan tinggi juga berhubungan dengan kewenangan kelembagaan dalam menentukan tujuan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk dengan kewenangan kelembagaan untuk menggunakan cara-cara tertentu dalam mencapai tujuan tersebut. Bidang otonomisasi perguruan tinggi yang paling hakiki adalah kebebasan akademik. Ia berupa kebebasan dosen dan ilmuwan secara personal dalam mencari dan mencapai kebenaran melalui pengajaran dan penelitian tanpa rasa takut atas hukuman maupun tindakan-tindakan administratif. Jika manajemen penjaminan mutu dijalankan dengan baik maka greater autonomy bagi perguruan tinggi swasta terutama bagi PTAIS akan lebih bermakna. Keberadaan lembaga penjaminan mutu di PTAIS tidak akan hanya menjadi papan nama/formalitas saja tetapi betul-betul berfungsi sesuai dengan tugas dan perannya. Lembaga

penjaminan mutu yang aktif akan berusaha mewujudkan *greater responsibility, greater quality assurance dan greater accountability* bagi lembaganya bukan cenderung mencari kesalahan-kesalahan orang lain di lingkungan lembaganya. *Greater autonomy* pun ketika dilaksanakan dengan efektif dan efisien akan berdampak pada pengembangan program studi dan kurikulum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. *Greater responsibility*, berarti PTAIS harus bertanggungjawab kepada semua *stakeholders* dan *customer* (mewakili seluruh masyarakat) tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Greater quality assurance* berarti PTAIS harus bisa memberikan jaminan lebih nyata terhadap kualitas proses, produk dan jasa baik melalui evaluasi internal maupun eksternal baik oleh badan independen luar negeri maupun dalam negeri (seperti BAN-PT). Evaluasi bahkan dapat dilakukan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta sendiri melalui sertifikasi internal. *Greater Accountabibty* terutama berhubungan dengan pengembangan ilmu, kualitas lulusan, penggunaan dana dan hasil-hasil riset melalui manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bentuk rasa tanggung jawab, tanggung gugat dan tanggung urai dari seseorang atau sebuah lembaga. Akuntabilitas Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat terutama kepada mahasiswa dan orang tua sebagai pelanggan utama. Selebihnya juga PTAIS harus bertanggung jawab kepada pengguna lulusan, asosiasi, dunia profesi beserta asosiasinya dan para ilmuwan di seluruh dunia. Pada dasarnya PTAIS juga usaha layanan jasa. Jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara, jasa pendidikan mempunyai ciri khusus yaitu; (a) dapat diukur misalnya layanan adminitrasinya; (b) tidak dapat diukur (misalnya kualitas pendidikan, di sini ada andil dari peserta didik); dan (c) prestasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang sebenarnya berupa 'upaya' atau 'proses' bukan hasil. Dengan demikian, pengelola Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta hendaknya sadar bahwa setiap saat harus selalu membuktikan bahwa dirinya telah melaksanakan manajemen dengan baik, berkinerja yang baik berdasarkan regulasi yang ada. Di sini akuntabilitas merupakan tanggung jawab sekaligus tanggung gugat atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Ketika sebuah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta telah beroperasi maka sebenarnya ia telah melakukan transaksi dengan konsumen dalam hal ini mahasiswa dan orang tua serta masyarakat pada umumnya. Bentuk transaksi ini dapat ditemukan dalam tiga tahap; 1) transaksi dalam tahap awal yaitu berupa iklan, brosur, seleksi penerimaan; 2) transaksi dalam tahap utama berupa proses administrasi dan belajar mengajar; 3) transaksi dalam tahap produk yaitu berupa lulusan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) maka setiap penyelenggara perguruan tinggi wajib mewaspadai kinerjanya. Karena pada gilirannya apabila masyarakat konsumen/pengguna usaha jasa perguruan tinggi telah sadar akan hak-haknya, tidak mustahil akan terjadi banyak gugatan dan tuntutan kepada perguruan tinggi yang melakukan "*mal praktik*".

Akuntabilitas kepada pemerintah berhubungan dengan tingkat kesesuaian pelaksanaan pendidikan di suatu perguruan tinggi dengan syarat-syarat yang diadakan pemerintah. PTAIS juga memerlukan akuntabilitas dalam hal penggunaan dana dan laporan tiap tahun yang diaudit oleh akuntan publik. Ini merupakan keharusan agar terjamin kepercayaan publik yang tinggi. Akuntabilitas PTAIS kepada dunia profesi bertujuan melanggengkan pengertian, kecakapan dan keterampilan bidang keilmuan. Secara filosofis PTAIS pun harus bertanggungjawab secara moral dan spiritual atas segala aktivitasnya dengan menunjukkan integritasnya dan memastikan diri dalam meningkatkan martabat umat manusia pada umumnya.

Robertson mengatakan bahwa internasionalisasi dalam pendidikan merupakan upaya penyiapan diri dari suatu negara agar ia dapat meraih kejayaan peradaban. Namun demikian internasionalisasi pendidikan jika tidak dikelola dengan baik bisa menjerumuskan negara ke dalam lembah kehancuran (Ward, 2000: 14). Dalam konteks itulah, upaya strategis peningkatan mutu di PTAIS yakni dengan adanya perbaikan manajemen mutu Sistem Pendidikan Tinggi Agama Swasta segera dilakukan secara simultan dan kontinyu. Manajemen penjaminan mutu pendidikan tinggi harus berorientasi pada pengembangan *international quality academics* (mutu akademis berskala internasional). Bagaimanapun juga kompetisi pendidikan tinggi di era pasar bebas menuntut adanya standar mutu pendidikan yang lebih baik, yang mampu masuk ke segmen Negara mana pun karena adanya global agreement standar yang memungkinkan hal itu terjadi, termasuk bagi negara berkembang seperti Indonesia. Manajemen sistem pendidikan yang lebih baik tersebut akan mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM yang akan dihasilkan oleh PTAIS di masa yang akan datang, sekaligus membantu memosisikan Indonesia dalam berbagai tingkat kompetisi, baik regional maupun internasional menjadi semakin baik. Tentunya kebijakan perbaikan manajemen sistem pendidikan tinggi tersebut tetap harus mempertimbangkan potensi daerah di mana PTAI tersebut berada.

Upaya pengembangan dan peningkatan manajemen mutu sistem pendidikan tinggi Islam bagi PTAIS di Indonesia dengan pendekatan *triple quality* yang dikembangkan oleh Juran, yang terkenal dengan konsep *Juran's Trilogy*, (Sallis, 2001) yang mencakup 3 komponen utama, yaitu;

- a. *Quality Planning* (Perencanaan Mutu).

Perencanaan mutu merupakan tahapan untuk menentukan dan merancang segala perangkat pendidikan tinggi, baik infrastruktur maupun lainnya seperti misi, visi, program, kebijakan, serta sketsa

tahapan proses yang akan dilalui untuk dirancang secara lebih matang dan komprehensif agar mampu menghasilkan pendidikan tinggi Islam yang lebih kompetitif dan produktif berdasarkan nilai-nilai keislaman sebagai landasan aplikasinya. Aspek *quality planning* menjadi penting dilakukan karena perkembangan PTAIS pada dasarnya juga menyesuaikan diri dari perkembangan masyarakat termasuk masyarakat global. Dengan kata lain, kebijakan yang dirancang adalah manifestasi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat (*social need and desire*);

b. *Quality Control (Pengendalian Mutu)*.

Tahapan ini juga penting karena pengendalian mutu pada dasarnya merupakan jaminan mutu yang ingin dihasilkan. Dengan adanya *quality control*, PTAIS dapat memastikan proses implementasi manajemen pendidikan tingginya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan semula, baik menyangkut program pendidikan yang dijalankan, kurikulum, perangkat infrastruktur pendidikan tinggi, SDM, out put yang dirancang, maupun tingkat akselerasinya terhadap kompetisi dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja agar tetap eksis dan *survive*.

c. *Quality Improvement (Peningkatan Mutu)*.

Tahapan ini merupakan upaya tindak lanjut dari proses pelaksanaan mutu di mana seluruh rencana akademis PTAIS yang telah dilaksanakan dievaluasi untuk kemudian dilakukan pembenahan secara simultan dan komprehensif guna memperbaiki kelemahan yang terjadi sebelumnya. Dengan peningkatan mutu berkelanjutan, eksistensi PTAIS di Indonesia akan lebih *appreciable* terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat global. Hal ini juga dapat diartikan bahwa pengelolaan program pendidikan tinggi Islam dalam konteks internasionalisasi pendidikan sudah saatnya memperhitungkan standar mutu sebagai basis peningkatan *akselerasi equality access* untuk bersaing berbagai tingkat kompetisi.

PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberadaan perguruan tinggi agama Islam (PTAI), termasuk PTAIN di Indonesia tidak lepas dari keberadaan PTAIS. Dalam sejarah, ternyata PTAIS sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, yakni sejak tahun 1930-an;
2. Pembinaan PTAIS berada dalam Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) mempunyai tanggung dan fungsi melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTAIS yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Dalam pelaksanaan pendidikan Islam di PTAIS mengalami beberapa permasalahan, diantaranya, yaitu: PTAIS belum menjadi pilihan

- utama calon mahasiswa, banyak dosen yang belum memenuhi tugas keprofesionalan, sarana dan prasarana yang belum memadai, proses belajar dan mengajar yang belum berkualitas, lemahnya penguasaan bahasa asing (Arab atau Inggris);
4. Cara menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam adalah: menarik minat mahasiswa untuk masuk PTAIS, meningkatkan profesionalisme dosen, melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan penguasaan bahasa asing (bahasa arab dan Inggris);

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohah, Hanun. 1999, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Nasional.
- Azizy, A. Qadri. 2001 *Pendidikan (agama) untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat)*, Semarang, Semarang: Aneka Cipta.
- Darwis, Djamaluddin. 2006, *Dinamika Pendidikan Islam: Sejarah Ragam dan Kelembagaan*, Semarang: RaSAIL.
- Daulay, Haidar, Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Feisal, Jusuf Amir. 1995, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasjmy, A. 1979, *Mengapa Umat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Isna, Mansur. 2001 *Diskursus Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Muhaimin, Pengembangan *Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005.
- PP. No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
- Qomar, Mujamil. 2007, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Syafaruddin, 2005, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Turner, S, Bryan. *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analisis atas Tesa Sosiologi Weber*, Terj. Machnun Husein, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Sufyarma. 2004. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2001. *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah: strategi Pendidikan Nasional dalam era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Uhamka Ekspres.
- Fadjar, A. Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: PT. RadjaGrafindo.

- Mas'ud, Abdurrahman dkk. 2001. Paradigma Pendidikan Islam. Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo: Semarang.
- Rivan, Ahmad. 2005. Strategi dan Prospek Pengembangan Mutu Lulusan PTAI di Indonesia. Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 23 Mei 2005.
- Dadan F. Ramdhan and Hariman Surya Siregar, "MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS)," *Jurnal Perspektif* 3, no. 1 (May 14, 2019): 75–109, <https://doi.org/10.15575/jp.v3i1.40>.
- Bunyamin Bunyamin and Alamsyah Alamsyah, "MANAJEMEN MUTU PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA," *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 2 (2013): 203–20, <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i2.544>.
- Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Metamorfosa Perguruan Tinggi Agama Islam," *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 1 (September 8, 2016): 92–109.
- Muhammad Zaim, "PEMIKIRAN PENDIDIKAN KH. HASYIM ASY'ARI (Studi Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Kitab Adab Al-'alim Wa Al-Muta'allim): PEMIKIRAN PENDIDIKAN KH. HASYIM ASY'ARI (Studi Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Kitab Adab Al-'alim Wa Al-Muta'allim)," *Muróbbi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (September 1, 2020): 151–70.